



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 334 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022-2024;
8. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 18 September 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG ORGANISASI	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 334 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 September 2023

TENTANG : PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026

“Visi RPJPD: “BOLAANG MONGONDOW YANG BARU, BERBUDAYA, BERDAYA SAING DAN MANDIRI SEBAGAI LUMBUNG PANGAN INDONESIA TIMUR “

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
MEWUJUDKAN BOLAANG MONGONDOW YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING.	MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING		INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	ANGKA	68,16	68,16	68,50	68,75	70	70,25	70,25
		MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN	INDEKS PENDIDIKAN	TAHUN	13,30	13,30	13,50	13,70	13,90	14	14
		MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN SEMESTA	RATA-RATA USIA HARAPAN HIDUP	ANGKA	69,45	69,45	69,55	69,65	69,75	70	70
		MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN	ANGKA KEMISKINAN	PERSEN	7,58	7,58	7	6,75	6,25	5,75	5,75
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PEMBANGUNAN	TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI		INDEKS INFRASTRUKTUR	ANGKA	61,88	65	66	67	68	70	70
		MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI	RASIO PANJANG JALAN DENGAN JUMLAH KENDARAAN	ANGKA	17,47	18	23,39	24,09	24,82	25,56	25,56
			PERSENTASE PANJANG JALAN DENGAN KONDISI BAIK	PERSEN	63	65	67	69	71	73	73

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	MENINGKATNYA LAYANAN AIR MINUM LAYAK	PERSENTASE RUMAH TANGGA BERAKSES AIR MINUM LAYAK	PERSEN	68,67	70,17	71,70	73,20	74,70	76,20	76,20
			INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGKA	71,95	71,95	71,96	71,97	71,98	72,00	72,00
		MENINGKATNYA KUALITAS AIR	INDEKS KUALITAS AIR	ANGKA	44,55	44,55	50,00	55,00	60,00	60,00	60,00
		MENINGKATNYA KUALITAS UDARA	INDEKS KUALITAS UDARA	ANGKA	95,43	95,43	95,43	95,43	95,43	95,43	95,43
		MENINGKATNYA KUALITAS TUTUPAN LAHAN	INDEKS TUTUPAN LAHAN	ANGKA	74,90	74,90	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG MANDIRI BERTUMPU PADA POTENSI SUMBERDAYA LOKAL.	MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI		PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN	3,87	4,50	4,90	5,10	5,58	6,15	6,15
			GINI RATIO	ANGKA	0,360	0,340	0,335	0,330	0,315	0,310	0,310
		MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN DAERAH	KONTRIBUSI PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN /TAHUN	10,05	10,10	10,10	10,30	10,30	10,35	10,35
			KONTRIBUSI PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN /TAHUN	- 0,28	1	1,22	2	2,5	3	3
		MENINGKATNYA DAYA TARIK INVESTASI BERSKALA NASIONAL	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI (PMA/PMDN)	PERSEN /TAHUN	5,32	10	10	10	10	10	10
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH,	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN		NILAI RATA RATA CAPAIAN OPINI BPK, NILAI SAKIP LPPD INDEKS PELAYANAN PUBLIK	ANGKA	71,01	-	77,5	83,5	84,75	87,75	87,75

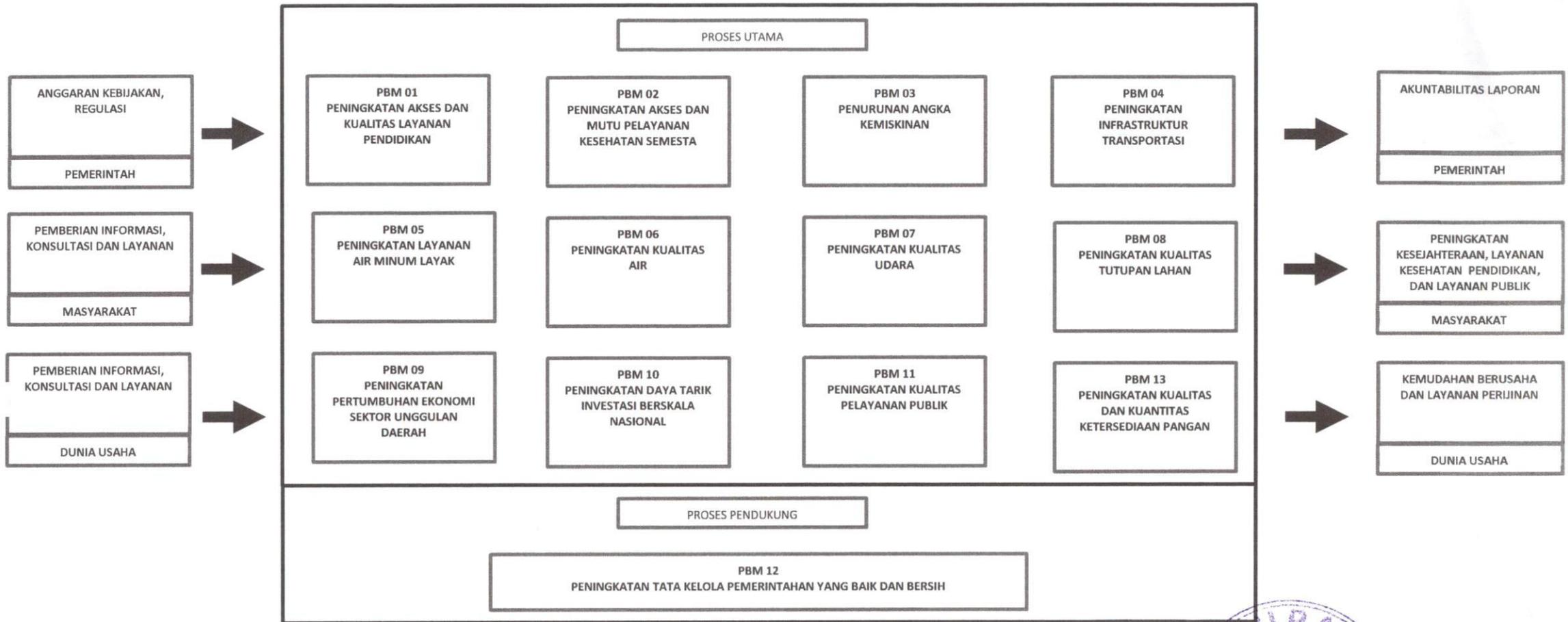
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
DEMOKRATIS DAN BEBAS KKN	PUBLIK YANG BERKUALITAS	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	ZONA	KUNING	KUNING	KUNING	KUNING	HIJAU	HIJAU	HIJAU
			MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH	OPINI BPK NILAI SAKIP LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	OPINI ANGKA/PREDIKAT ANGKA	WTP B 3,4	WTP B 3,5	WTP B 3,6	WTP BB 3,7	WTP BB 3,8	WTP BB 3,9
MEWUJUDKAN BOLAANG MONGONDOW SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DI INDONESIA BAGIAN TIMUR	MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH		INDEKS KETAHANAN PANGAN	ANGKA	84,84	84,89	84,94	84,99	85,04	85,15	85,15
			MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS KETERSEDIAAN PANGAN	RASIO PANGAN	ANGKA	0,96	1,02	1,08	1,14	1,14	1,2

IDENTIFIKASI PROSES

NO	NAMA PETA PROSES	JENIS PROSES UTAMA / PENDUKUNG	KODE PROSES
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN	Utama	PBM 01
2	PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN SEMESTA	Utama	PBM 02
3	PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN	Utama	PBM 03
4	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI	Utama	PBM 04
5	PENINGKATAN LAYANAN AIR MINUM LAYAK	Utama	PBM 05
6	PENINGKATAN KUALITAS AIR	Utama	PBM 06
7	PENINGKATAN KUALITAS UDARA	Utama	PBM 07
8	PENINGKATAN KUALITAS TUTUPAN LAHAN	Utama	PBM 08

NO	NAMA PETA PROSES	JENIS PROSES UTAMA / PENDUKUNG	KODE PROSES
(1)	(2)	(3)	(4)
9	PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN DAERAH	Utama	PBM 09
10	PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI BERSKALA NASIONAL	Utama	PBM 10
11	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Utama	PBM 11
12	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH	Pendukung	PBM 12
13	PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS KETERSEDIAAN PANGAN	Utama	PBM 13

PETA PROSES PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG ORGANISASI	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj BUPATI BOLAANG MONGONDOW,
 EMI MORODOMPIT

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 334 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 September 2023

TENTANG : PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

IDENTIFIKASI PETA SUB PROSES

NO	NAMA PETA SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama Proses 1 : PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN. PBM.01				
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PBM.01.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	PBM.01.01.CFM 01
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	PBM.01.01.CFM 02
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	PBM.01.01.CFM 03
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	PBM.01.01.CFM 04
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PBM.01.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	PBM.01.02.CFM 01
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PBM.01.03	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	PBM.01.03.CFM 01
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PBM.01.04	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PBM.01.04.CFM 01
5	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PBM.01.05	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PBM.01.05.CFM 01
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PBM.01.05.CFM 02
6	PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN	PBM.01.06	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	PBM.01.06.CFM 01
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	PBM.01.06.CFM 02
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	PBM.01.06.CFM 03
7	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PBM.01.07	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	PBM.01.07.CFM 01

NO	NAMA PETA SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PBM.01.08	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PBM.01.08.CFM 01
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PBM.01.08.CFM 02
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	PBM.01.08.CFM 03
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	PBM.01.08.CFM 04
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	PBM.01.08.CFM 05
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PBM.01.09	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	PBM.01.09.CFM 01
10	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PBM.01.10	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	PBM.01.10.CFM 01
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PBM.01.10.CFM 02
11	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PBM.01.11	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	PBM.01.11.CFM 01
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	PBM.01.11.CFM 02
12	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PBM.01.12	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PBM.01.12.CFM 01
13	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PBM.01.13	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PBM.01.13.CFM 01
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	PBM.01.13.CFM 02
14	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PBM.01.14		

NO	NAMA PETA SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PBM.01.15	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	PBM.01.15.CFM 01
16	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PBM.01.16	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PBM.01.16.CFM 01
17	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PBM.01.17	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PBM.01.17.CFM 01
18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PBM.01.18	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	PBM.01.18.CFM 01
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PBM.01.19	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	PBM.01.19.CFM 01
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PBM.01.20	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	PBM.01.20.CFM 01
Nama Proses 2 : PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN SEMESTA. PBM.02				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PBM.02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PBM.02.01.CFM 01
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PBM.02.01.CFM 02
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	PBM.02.01.CFM 03
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PBM.02.01.CFM 04
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PBM.02.02	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	PBM.02.02.CFM 01

NO	NAMA PETA SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	PBM.02.02.CFM 02
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PBM.02.02.CFM 03
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PBM.02.03	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	PBM.02.03.CFM 01
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	PBM.02.03.CFM 02
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	PBM.02.03.CFM 03
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	PBM.02.03.CFM 04
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PBM.02.04	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PBM.02.04.CFM 01
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PBM.02.04.CFM 02
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PBM.02.04.CFM 03
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PBM.02.05	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PBM.02.05.CFM 01
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PBM.02.05.CFM 02
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	PBM.02.05.CFM 03
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PBM.02.06	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	PBM.02.06.CFM 01

NO	NAMA PETA SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PBM.02.07	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	PBM.02.07.CFM 01
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PBM.02.07.CFM 02
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PBM.02.08	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	PBM.02.08.CFM 01
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	PBM.02.08.CFM 02
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	PBM.02.08.CFM 03
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	PBM.02.08.CFM 04
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PBM.02.09	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	PBM.02.09.CFM 01
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	PBM.02.09.CFM 02
Nama Proses 3 : PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN. PBM.03				
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PBM.03.01	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PBM.03.01.CFM 01
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PBM.03.02	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	PBM.03.02.CFM 01
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	PBM.03.02.CFM 02
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PBM.03.03	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	PBM.03.03.CFM 01
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PBM.03.04	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	PBM.03.04.CFM 01

NO	NAMA PETA SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	PBM.03.04.CFM 02
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PBM.03.05	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	PBM.03.05.CFM 01
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PBM.03.05.CFM 02
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PBM.03.05.CFM 03
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	PBM.03.05.CFM 04
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PBM.03.06	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PBM.03.06.CFM 01
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PBM.03.07	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	PBM.03.07.CFM 01
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	PBM.03.07.CFM 02
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	PBM.03.07.CFM 03
	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	PBM.03.08	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	PBM.03.08.CFM 01
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PBM.03.09	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	PBM.03.09.CFM 01
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	PBM.03.09.CFM 02
			Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PBM.03.09.CFM 03
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PBM.03.10	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	PBM.03.10.CFM 01
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PBM.03.11	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	PBM.03.11.CFM 01
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PBM.03.12	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	PBM.03.12.CFM 01

NO	NAMA PETA SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PBM.03.13	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PBM.03.13.CFM 01
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	PBM.03.13.CFM 02
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PBM.03.14	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	PBM.03.14.CFM 01
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PBM.03.15	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PBM.03.15.CFM 01
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	PBM.03.15.CFM 02
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PBM.03.16	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	PBM.03.16.CFM 01
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PBM.03.17	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PBM.03.17.CFM 01
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PBM.03.18	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	PBM.03.18.CFM 01
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	PBM.03.18.CFM 02
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PBM.03.19	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	PBM.03.19.CFM 01
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PBM.03.20	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	PBM.03.20.CFM 01
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PBM.03.21	Administrasi Tata Pemerintahan	PBM.03.21.CFM 01
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	PBM.03.21.CFM 02
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PBM.03.22	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	PBM.03.22.CFM 01
Nama Proses 4 : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI. PBM.04				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PBM.04.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	PBM.04.01.CFM 01
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PBM.04.01.CFM 02

NO	NAMA PETA SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	PBM.04.01.CFM 03
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	PBM.04.01.CFM 04
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	PBM.04.01.CFM 05
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	PBM.04.01.CFM 06
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	PBM.04.01.CFM 07
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	PBM.04.01.CFM 08
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PBM.04.01.CFM 09
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PBM.04.01.CFM 10
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PBM.04.01.CFM 11
			Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PBM.04.01.CFM 12
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PBM.04.02	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	PBM.04.02.CFM 01
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PBM.04.03	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	PBM.04.03.CFM 03
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PBM.04.04	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	PBM.04.04.CFM 01
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PBM.04.04.CFM 02
			Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	PBM.04.04.CFM 03
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	PBM.04.04.CFM 04
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PBM.04.05	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	PBM.04.05.CFM 01

NO	NAMA PETA SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	PBM.04.05.CFM 02
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	PBM.04.05.CFM 03
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	PBM.04.05.CFM 04
Nama Proses 5 : PENINGKATAN LAYANAN AIR MINUM LAYAK. PBM.05				
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PBM.05.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PBM.05.01.CFM 01
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PBM.05.01.CFM 02
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PBM.05.02	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	PBM.05.02.CFM 01
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PBM.05.03	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	PBM.05.03.CFM 01
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PBM.05.04	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	PBM.05.04.CFM 01
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	PBM.05.04.CFM 02
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	PBM.05.04.CFM 03
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	PBM.05.04.CFM 04
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	PBM.05.04.CFM 05
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	PBM.05.04.CFM 06
			Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	PBM.05.04.CFM 07

NO	NAMA PETA SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PBM.05.05	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	PBM.05.05.CFM 01
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	PBM.05.05.CFM 02
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	PBM.05.05.CFM 03
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PBM.05.06	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	PBM.05.06.CFM 01
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PBM.05.07	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	PBM.05.07.CFM 01
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PBM.05.08	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	PBM.05.08.CFM 01
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	PBM.05.09		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PBM.05.10	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	PBM.05.10.CFM 01
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	PBM.05.10.CFM 02
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	PBM.05.10.CFM 03
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	PBM.05.10.CFM 04
Nama Proses 6 : PENINGKATAN KUALITAS AIR. PBM.06				
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PBM.06.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	PBM.06.01.CFM 01
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kabupaten / Kota	PBM.06.01.CFM 02
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	PBM.06.01.CFM 03
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PBM.06.02	Penyimpanan sementara Limbah B3	PBM.06.02.CFM 01

NO	NAMA PETA SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama Proses 7 : PENINGKATAN KUALITAS UDARA. PBM.07				
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PBM.07.01	Pengelolaan Sampah	PBM.07.01.CFM 01
			Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	PBM.07.01.CFM 02
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	PBM.07.01.CFM 03
Nama Proses 8 : PENINGKATAN KUALITAS TUTUPAN LAHAN. PBM.08				
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PBM.08.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	PBM.08.01.CFM 01
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	PBM.08.01.CFM 02
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PBM.08.02	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	PBM.08.02.CFM 01
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PBM.08.03	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PBM.08.03.CFM 01
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	PBM.08.04	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	PBM.08.04.CFM 01
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PBM.08.05	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PBM.08.05.CFM 01
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PBM.08.06	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PBM.08.06.CFM 01
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PBM.08.07	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	PBM.08.07.CFM 01
Nama Proses 9 : PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN DAERAH. PBM.09				
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PBM.09.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	PBM.09.01.CFM 01
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	PBM.09.01.CFM 02

NO	NAMA PETA SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PBM.09.02	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	PBM.09.02.CFM 01
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	PBM.09.02.CFM 02
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PBM.09.02.CFM 03
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PBM.09.03	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PBM.09.03.CFM 01
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PBM.09.04	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	PBM.09.04.CFM 01
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PBM.09.05	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	PBM.09.05.CFM 01
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PBM.09.06	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	PBM.09.06.CFM 01
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	PBM.09.06.CFM 02
			Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	PBM.09.06.CFM 03
			Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	PBM.09.06.CFM 04
			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	PBM.09.06.CFM 05
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	PBM.09.06.CFM 06
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	PBM.09.07	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	PBM.09.07.CFM 01
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PBM.09.08	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	PBM.09.08.CFM 01

NO	NAMA PETA SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	PBM.09.09	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	PBM.09.09.CFM 01
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PBM.09.10	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	PBM.09.10.CFM 01
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PBM.09.11	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	PBM.09.11.CFM 01
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PBM.09.12	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	PBM.09.12.CFM 01
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PBM.09.13	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PBM.09.13.CFM 01
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PBM.09.14	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	PBM.09.14.CFM 01
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PBM.09.15	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	PBM.09.15.CFM 01
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PBM.09.16	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	PBM.09.16.CFM 01
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PBM.09.17	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	PBM.09.17.CFM 01
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PBM.09.18	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	PBM.09.18.CFM 01
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	PBM.09.18.CFM 02
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	PBM.09.18.CFM 03

NO	NAMA PETA SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PBM.09.19	Pengembangan Prasarana Pertanian	PBM.09.19.CFM 01
			Pembangunan Prasarana Pertanian	PBM.09.19.CFM 02
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PBM.09.20	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	PBM.09.20.CFM 01
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PBM.09.21	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	PBM.09.21.CFM 01
	PROGRAM PENATAAN DESA	PBM.09.22	Penyelenggaraan Penataan Desa	PBM.09.22.CFM 01
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PBM.09.23	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	PBM.09.23.CFM 01
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PBM.09.24	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	PBM.09.24.CFM 01
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PBM.09.25	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	PBM.09.25.CFM 01

Ma Proses 10 : PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI BERSKALA NASIONAL. PBM.10

	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PBM.10.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PBM.10.01.CFM 01
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	PBM.10.01.CFM 02
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PBM.10.02	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PBM.10.02.CFM 01
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PBM.10.03	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	PBM.10.03.CFM 01
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PBM.10.04	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PBM.10.04.CFM 01

NO	NAMA PETA SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama Proses 11 : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. PBM.11				
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PBM.11.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PBM.11.01.CFM 01
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PBM.11.02	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	PBM.11.02.CFM 01
			Penataan Pendaftaran Penduduk	PBM.11.02.CFM 02
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	PBM.11.02.CFM 03
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PBM.11.03	Pelayanan Pencatatan Sipil	PBM.11.03.CFM 01
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	PBM.11.03.CFM 02
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PBM.11.04	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	PBM.11.04.CFM 01
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	PBM.11.04.CFM 02
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PBM.11.05	Penyusunan Profil Kependudukan	PBM.11.05.CFM 01
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PBM.11.06	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PBM.11.06.CFM 01
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PBM.11.06.CFM 02
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PBM.11.07	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PBM.11.07.CFM 01
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PBM.11.08	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	PBM.11.08.CFM 01
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PBM.11.09	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PBM.11.09.CFM 01
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	PBM.11.09.CFM 02
Nama Proses 12 : PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH. PBM.12				
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PBM.12.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PBM.12.01.CFM 01

NO	NAMA PETA SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	PBM.12.01.CFM 02
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	PBM.12.01.CFM 03
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PBM.12.02	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	PBM.12.02.CFM 01
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	PBM.12.02.CFM 02
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	PBM.12.02.CFM 03
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PBM.12.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	PBM.12.03.CFM 01
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	PBM.12.03.CFM 02
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	PBM.12.03.CFM 03
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PBM.12.04	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	PBM.12.04.CFM 01
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	PBM.12.04.CFM 02
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PBM.12.05	Pendampingan dan Asistensi	PBM.12.05.CFM 01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PBM.12.06	Penataan Organisasi	PBM.12.06.CFM 01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PBM.12.07	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PBM.12.07.CFM 01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PBM.12.08	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PBM.12.08.CFM 01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PBM.12.09	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	PBM.12.09.CFM 01
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PBM.12.10	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	PBM.12.10.CFM 01
			Peningkatan Kapasitas DPRD	PBM.12.10.CFM 02
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	PBM.12.10.CFM 03
			Fasilitasi Tugas DPRD	PBM.12.10.CFM 04
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PBM.12.11	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	PBM.12.11.CFM 01

NO	NAMA PETA SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	PBM.12.11.CFM 02
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	PBM.12.11.CFM 03
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PBM.12.12	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PBM.12.12.CFM 01
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PBM.12.13	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	PBM.12.13.CFM 01
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PBM.12.14	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PBM.12.14.CFM 01
			Mutasi dan Promosi ASN	PBM.12.14.CFM 02
			Pengembangan Kompetensi ASN	PBM.12.14.CFM 03
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PBM.12.14.CFM 04
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	PBM.12.15	Pengembangan Kompetensi Teknis	PBM.12.15.CFM 01
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	PBM.12.15.CFM 02
Nama Proses 13 : PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS KETERSEDIAAN PANGAN. PBM.13				
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	PBM.13.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PBM.13.01.CFM 01
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PBM.13.02	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	PBM.13.02.CFM 01
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	PBM.13.02.CFM 02
			Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	PBM.13.02.CFM 03
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	PBM.13.02.CFM 04
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PBM.13.03	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	PBM.13.03.CFM 01
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	PBM.13.03.CFM 02
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PBM.13.04	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	PBM.13.04.CFM 01

NO	NAMA PETA SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PBM.13.05	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	PBM.13.05.CFM 01
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	PBM.13.05.CFM 02
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PBM.13.06	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	PBM.13.06.CFM 01
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PBM.13.07	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	PBM.13.07.CFM 01
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PBM.13.08	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	PBM.13.08.CFM 01
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	PBM.13.08.CFM 02
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PBM.13.09	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	PBM.13.09.CFM 01
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PBM.13.10	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	PBM.13.10.CFM 01
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	PBM.13.10.CFM 02
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	PBM.13.10.CFM 03
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PBM.13.11	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PBM.13.11.CFM 01
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	PBM.13.11.CFM 02
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	PBM.13.11.CFM 03
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PBM.13.12	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	PBM.13.12.CFM 01
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PBM.13.13	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	PBM.13.13.CFM 01

NO	NAMA PETA SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	PBM.13.13.CFM 02
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	PBM.13.13.CFM 03

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



GIMP MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG ORGANISASI	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	